

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dalam Pembentukan Holding BUMN Migas pemerintah melakukan penyertaan modal yang bersumber pada saham milik negara pada BUMN, konsekuensinya Negara harus melakukan Pengalihan saham, dalam hal ini saham milik negara pada PT PGN (Persero) dialihkan ke PT Pertamina (Persero).
2. Pengalihan hak atas saham milik negara pada PT PGN (Persero) ke PT Pertamina (Persero) adalah sah karena telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pengalihan hak atas saham tersebut mengakibatkan terjadinya transformasi saham, sehingga terdapat perubahan atas kepemilikan saham milik negara sebesar 56,96%. Setelah pembentukan Holding Migas ini, kedudukan 56,96% saham Negara dialihkan sebagai penyertaan modal Negara dalam pembentukan Holding Migas.

4.2. Saran

Perlu disusun pengaturan yang lebih jelas dan khusus oleh Pemerintah mengenai prosedur pelaksanaan pembentukan Holding BUMN agar tercipta kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2000.

-----, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Go, Marcel, *Akuisisi Bisnis: Analisis dan Pengelolaan*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.

Kristanto, Fennieka, *Potensi Konflik: Dalam Akuisisi Perusahaan*, Ombak, Jogjakarta, 2003.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Soebagjo, Felix Oentoeng, *Akuisisi Perusahaan di Indonesia: Tujuan, Pelaksanaan dan Permasalahannya*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Sugiharto, *Peran Strategis BUMN: Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari Ini dan Masa Depan*, Gramedia, Jakarta, 2007.

Widjaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc., Bekasi, 2006.

Widyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Jurnal atau Makalah

Ambarwati, Arum, *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger Dan Akuisisi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2006-2012*, Jurnal FEB Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Semarang, 2012.

Budiono, Herlien, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2, Agustus, Bandung, 2012.

Judhanto, Adhi Suryo, *Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, E-Jurnal Spirit Pro Patria, Vol. IV, No. 2, September 2018.

Pranoto, Toto, dan Willem A. Makaliwe, *Restrukturisasi BUMN Menjadi Holding Company*, Tim Riset Lembaga Management FEUI, Depok, http://www.lmfeui.com/data/Restrukturisasi_Holding_Company%20Revisi%202.pdf, dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2019.

-----, *Holding Company BUMN Konsep, Implementasi dan Benchmarking*, Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2017.

Sefriani, *Status Hukum Aset Perusahaan Negara Dalam Hukum Internasional*, MIMBAR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 24, Nomor 3, Yogyakarta, Oktober 2012.

Sudiarta, I. Wayan, dan I. Wayan Novy Purwanto, "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan

Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan Terbatas)”, Artikel Fakul Hukum Universitas Udaya..., <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10494/7556>, dikunjungi pada 28 Juni 2019.

Timbo, David Putra, dan Peter Mahmud Marzuki, *Status Uang APBN Yang Dipisahkan Dan Dijadikan Penyertaan Modal Pada Bumh Persero*, Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, <https://media.neliti.com/media/publications/109556-ID-status-uang-apbn-yang-dipisahkan-dan-dij.pdf> dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2019.

Skripsi atau Tesis

Fitriani, Risma Intan. *Akibat Hukum Tindakan Pemerintah dan Tindakan Perseroan Dalam Transformasi Saham Milik Pemerintah Pada Holdingisasi BUMN Persero*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.

Yuliani, Ratna, *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2013, dikutip dari http://eprints.ums.ac.id/27051/7/02_NASKAH_PUBLIKASI2.pdf pada 1 Mei 2019.

Internet

Amelia, Anggita Rezki, "Kementerian BUMN Pilih Skema Akuisisi untuk Gabung PGN dan Pertagas", <https://m.katadata.co.id/berita/2018/04/11/kementerian-bumn-pilih-skema-akuisisi-untuk-gabung-pgn-dan-pertagas>, 11 April 2018, dikunjungi pada tanggal 25 Juni 2019.

Anwar, Muhammad Choirul, "Sah! PGN Akuisisi Pertagas dan 4 Anak Usaha Rp 20,18 T", CNBC Indonesia, 28 Desember 2018, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181228160930-17-48351/sah-pgn-akuisisi-pertagas-dan-4-anak-usaha-rp-2018-t> pada 5 Desember 2019.

Asyhadie, H. Zaeni, dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, h. 109., dalam I. Wayan Sudiarta, I. Wayan Novy Purwanto, “Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Persero Terbatas)”, Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10494/755>, dikunjungi pada 28 Juni 2019.

Budiartie, Gustidha, “RUPS PGN Bakal Rombak Direksi dan Komite Utama”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180426134155-11-12600/rups-pgn-bakal-rombak-direksi-dan-komisaris-utama>, 26 April 2018, dikunjungi pada tanggal 9 Desember 2019.

Hadi, Ilman, “Status Hukum Anak Perusahaan BUMN”, *Hukumonline.com*, Jakarta, 2012, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50629054c7269/status-hukum-anak-perusahaan-bumn-persero> pada 8 April 2019.

Hukumonline, “Ini Poin Penting PP Penyertaan Modal Negara Bagi BUMN”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5878d05720044/ini-poin-penting-pp-penyertaan-modal-negara-bagi-bumn/>, 13 Januari 2017, dikunjungi pada tanggal 11 Desember 2019.

Indonesia.go.id, Redaksi, “Akan Dibentuk Super Holding”, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/akan-dibentuk-super-holding>, 24 April 2019, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2019.

MB9, Forum, “Holding Migas dan Integrasi Bisnis Gas”, http://fmb9.id/document/1533113963_BUMN.pdf, 1 Agustus 2018, h.3, dikunjungi pada tanggal 9 Desember 2019.

Mediadi, Alvin, “Status Hukum Keuangan Anak Perusahaan BUMN”, *Hukumonline.com*, Jakarta, 2017, dikutip dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5889607369e72/status-hukum-keuangan-anak-perusahaan-bumn#_ftn9 pada 8 April 2019.

Rahadian, Aristya, “Akuisisi Pertamina, Begini Struktur Organisasi Baru PGN”, *CNBC Indonesia*, 3 Juli 2018, dikutip dari

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20180703114218-20-21606/akuisisi-pertagas-begini-struktur-organisasi-baru-pgn> pada 19 Februari 2019.

Sabran, Ahmad, “Perusahaan Induk BUMN Harus Buat SOP Pengelolaan Aset”, Wartakotalive, 22 Desember 2017, dikutip dari <http://wartakota.tribunnews.com/2017/12/22/perusahaan-induk-bumn-harus-buat-sop-pengelolaan-aset>. pada 15 Agustus 2018.

Satrianegara, Rivi, “Begini Tahap Pembentukan Holding BUMN Migas”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180123165622-4-2307/begini-tahap-pembentukan-holding-bumn-migas>, 23 Januari 2018, dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2019.

<https://eprints.uny.ac.id/8555/3/BAB%20%20-%2008408144002.pdf>, dikunjungi pada 10 Oktober 2018.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269777-T37019-Raden%20Rita%20Diana.pdf>, dikunjungi pada 10 Oktober 2018.

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk Dalam Rangka Memenuhi Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, 2 Juli 2018, <http://ir.pgn.co.id/static-files/9d9f4a1e-ae3b-4cf4-8325-44fb0777a5d0> dikunjungi pada tanggal 8 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-16/MBU/01/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2015-2019.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017.